

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Aditya Pramana. 2021. "Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1.

Ahmad Rifa'i. 2021. "Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2.

Ananda, R. 2023. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2.

Andi Prasetyo. 2022. "Kepastian Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pidana di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3.

Andika Wibowo dan Diah Lestari. 2024. "Diskresi Penyidik dalam Penanganan Perkara Narkotika." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 2.

Andri Winjaya Laksana. 2021. "Politik Hukum Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 4.

Ardiansyah Putra. 2022. "Analisis Barang Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 13 No. 2.

Arief Budiman. 2023. "Batas Waktu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3.

Arief Setyawan. 2021. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3.

Bima Wicaksono. 2024. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 3.

Budi Santoso. 2023. "Pendekatan Rehabilitatif dalam Kebijakan Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1.

Dian Eka Putri. 2021. "Pendekatan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridika*, Vol. 36 No. 3.

Dika Pramudya. 2024. "Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1.

Fajar Nugroho. 2021. "Kendala Implementasi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2.

Feri Amsari. 2022. "Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1.

Gusti Ayu Novira Santi, dkk. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 2 No. 3.

Hendra Kurniawan. 2021. "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3.

Indra Saputra. 2023. "Kewenangan Hakim dalam Penetapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Yuridika*, Vol. 38 No. 2.

Irwan Adi Cahyadi, Tunggul Anshari, Dhia Al Uyun. 2014. "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Artikel Ilmiah*, Vol. 1 No. 1.

Laila Nur Azizah. 2022. "Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2.

Luthfi Ramadhan. 2023. "Peran Asesmen Terpadu dalam Penentuan Status Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Yuridika*, Vol. 38 No. 1.

MacEachen, E., Kosny, A., & Young, M. 2022. "Laws and Policies Protecting Vulnerable Workers and Defendants." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19.

Martalina Nazara. 2020. "Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin." *Jurnal Ilmu Hukum UHN*, Vol. 2 No. 1.

Meirina Fajarwati. 2017. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2.

Muhammad Iqbal dan Rina Kartika. 2021. "Problematika Penentuan Status Penyalahguna dan Pengedar dalam Perkara Narkotika." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 3.

Nabyla Risfa Izzati. 2023. "Tinjauan Penetapan Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No. 2.

Nanda Pratama. 2023. "Pendekatan Rehabilitasi dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2.

Nindy Pratiwi dan Hendra Saputra. 2022. "Peran Pemeriksaan Medis dalam Pembuktian Perkara Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau*, Vol. 11 No. 2.

Nurul Fadhilah dan Ahmad Fauzi. 2022. "Peran Hakim dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3.

Prasetyo, T. 2022. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3.

R. Andika Putra. 2022. "Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2.

Rahmat Fauzi dan Dian Lestari. 2022. "Problematika Implementasi Rehabilitasi dalam Penanganan Perkara Narkotika." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3.

Rahmat Hidayat dan M. Yusuf. 2021. "Peran Asesmen Terpadu dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2.

Rahmawati, S. 2021. "Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *Lex Journalica*, Vol. 18 No. 1.

Rendy Saputra. 2023. "Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam Putusan Perkara Narkotika." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2.

Rika Pratiwi dan Ahmad Syarif. 2024. "Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13 No. 1.

Rika Saraswati. 2021. "Pendekatan Rehabilitasi dalam Kebijakan Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4.

Rizal Akbar dan Nanda Kurnia. 2022. "Asesmen Terpadu dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2.

Rizky Ananda. 2023. "Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2.

Rudi Hartono dan Andika Pratama. 2024. "Implementasi Asesmen Terpadu dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1.

Rudi Hartono. 2023. "Asesmen Terpadu dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1.

Sinta Lamria Yulianti Siagian, dkk. 2023. "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Rehabilitasi." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. XII No. 5.

Siti Nurhayati dan Ahmad Fathoni. 2022. "Pembedaan Perlakuan Hukum antara Penyalahguna dan Pengedar Narkotika." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3.

Yudi Santoso. 2022. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika." *Jurnal Yuridika*, Vol. 37 No. 1.

B. Buku

- Badan Narkotika Nasional. 2022. Laporan Statistik Rehabilitasi Pecandu Narkotika 2010–2022. Jakarta: BNN RI.
- Bagir Manan. 2020. Mahkamah Agung dan Dinamika Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ehrlich, Eugen. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Friedman, Lawrence M. 2017. *Legal Culture and Legal Development in the United States and Abroad*. New York: Routledge.
- Hadjon, Philipus M. 2020. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2022. *Konstitusi dan Konsepsi Negara Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Maria Farida Indrati. 2021. *Hukum Acara Pidana dan Dinamika Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dilla. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

L
A
M
P
I
R
A
N



Wawancara terhadap Wasidik AIPTU Heru Kristian, S.H., M.H



Wawancara terhadap Penyidik AIPTU Joko Susanto, S.H



**Wawancara terhadap Kabubdit 1 Ditresnarkoba Polda Bengkulu
AKBP Frengki Leo**